

LPDP

Hendri Kampai: Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, Komisi III DPR RI Makin Menyala

Updates. - LPDP.OR.ID

Nov 15, 2024 - 09:15



PEMERINTAHAN - Rapat kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik [Indonesia](#) (DPR RI) dan [Jaksa Agung RI](#) sering kali menjadi momen penting dalam upaya mengevaluasi kinerja kejaksaan dan membahas berbagai isu hukum yang krusial di tanah air.

Di bawah sorotan publik, rapat kerja ini tidak hanya menjadi forum diskusi namun sering kali mencerminkan dinamika yang menggambarkan semangat tinggi dan ketegangan antara para anggota dewan dengan pihak [Kejaksaan Agung](#). Dalam beberapa kesempatan terakhir, pertemuan ini bahkan memperlihatkan atmosfer yang kian memanas, khususnya ketika menyoroti masalah hukum yang menjadi perhatian masyarakat, seperti korupsi, penegakan hukum, serta masalah integritas institusi penegak hukum.

Rapat Kerja Sebagai Forum Evaluasi Kinerja

Salah satu fungsi utama dari rapat kerja ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja institusi kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. [Komisi III DPR RI](#), yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, memegang peran penting dalam memastikan bahwa lembaga kejaksaan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada setiap rapat kerja, [Jaksa Agung](#) diminta untuk memaparkan capaian-capaian selama periode tertentu serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Namun, atmosfer dalam rapat kerja ini sering kali berubah menjadi intens ketika anggota dewan merasa ada ketidakpuasan terhadap jawaban atau langkah yang diambil oleh pihak kejaksaan. Beberapa anggota [Komisi III DPR RI](#) sering kali memberikan pertanyaan yang kritis dan tajam, terlebih jika terdapat kasus-kasus besar yang belum terselesaikan atau isu integritas yang melibatkan aparat kejaksaan. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk menuntut kejelasan dan transparansi, serta memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.

Sorotan pada Isu Korupsi dan Integritas Lembaga

Isu korupsi menjadi topik utama dalam sebagian besar rapat kerja antara [DPR RI](#) dan [Jaksa Agung](#). Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh, baik di sektor publik maupun swasta, menjadi perhatian luas masyarakat dan menimbulkan harapan agar kejaksaan dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan adil dan tegas.

Dalam konteks ini, **Komisi III** sering mempertanyakan langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh kejaksaan dalam menangani korupsi. Anggota dewan menuntut komitmen yang lebih kuat dari pihak kejaksaan untuk tidak hanya mengusut pelaku, tetapi juga membenahi sistem internal yang rentan disusupi praktik korupsi.

Selain itu, integritas lembaga kejaksaan sering menjadi sorotan, terutama ketika terjadi kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan atau suap. **Komisi III** menilai bahwa untuk memulihkan kepercayaan publik, Jaksa Agung perlu menunjukkan komitmen yang lebih tegas dalam membersihkan institusi dari oknum-oknum yang mencoreng nama baik lembaga. Dalam rapat kerja yang semakin memanas, anggota [DPR RI](#) bahkan tidak segan untuk mengkritik jika mereka merasa bahwa kejaksaan tidak mengambil tindakan yang cukup tegas terhadap kasus-kasus semacam itu.

Ketegangan dan Tekanan Politik

Dalam banyak kesempatan, rapat kerja antara **DPR** dan **Jaksa Agung** ini juga diwarnai oleh ketegangan yang mencerminkan tarik-menarik antara aspek hukum dan politik. Anggota Komisi III yang memiliki afiliasi politik tertentu kadang memberikan pandangan yang sejalan dengan kepentingan partai atau kelompoknya.

Di sisi lain, [Jaksa Agung](#) diharapkan mampu bersikap netral dan profesional dalam menghadapi tekanan politik ini. Hal ini terkadang menimbulkan friksi, di mana anggota **DPR** menuntut akuntabilitas yang lebih besar sementara **Jaksa Agung** harus tetap berhati-hati agar tidak terkesan tunduk pada intervensi politik.

Dalam situasi seperti ini, rapat kerja menjadi ajang pembuktian apakah lembaga kejaksaan dapat menjaga integritasnya sebagai penegak hukum yang bebas dari pengaruh politik atau tidak. Sikap [Jaksa Agung](#) dalam merespon tekanan politik sering menjadi indikator penting bagi publik tentang independensi institusi kejaksaan. Publik mengharapkan bahwa [Kejaksaan Agung](#) tidak hanya bekerja sesuai perintah kekuasaan, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan dan kebenaran.

Tantangan ke Depan: Membangun Institusi yang Lebih Kuat dan Transparan
Rapat kerja antara [Komisi III DPR RI](#) dan [Jaksa Agung](#), yang semakin menegangkan, mencerminkan harapan publik yang tinggi terhadap reformasi di tubuh kejaksaan. Tugas berat menanti kejaksaan untuk membenahi internal institusi serta membuktikan komitmen mereka dalam penegakan hukum yang transparan dan berintegritas. Selain itu, kejaksaan juga dituntut untuk lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan publik terkait kasus-kasus besar agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan.

Secara keseluruhan, rapat kerja yang seringkali diwarnai oleh atmosfer yang "menyala" ini memiliki potensi untuk menjadi momentum positif jika dikelola dengan baik. Pertanyaan kritis dari **Komisi III** bisa menjadi dorongan bagi [Jaksa Agung](#) untuk memperbaiki kinerja institusi dan meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat. Ke depan, diharapkan kejaksaan dapat memanfaatkan masukan dari [DPR RI](#) dan mengedepankan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih bersih dan dipercaya oleh publik.

Dengan demikian, rapat kerja antara [DPR RI](#) dan [Jaksa Agung](#) tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi periodik, namun juga sebagai wahana bagi kedua lembaga untuk berdiskusi secara konstruktif demi tercapainya penegakan hukum yang adil dan transparan.

Jakarta, 15 November 2024

Hendri Kampai

Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi